

KONSEP DASAR IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI PROPINSI JAWA TIMUR

Basic Concept of Gender Mainstreaming Implementation on Functional Literacy Education in East Java Province

Trisakti Handayani¹ & Wahyu Widodo²

¹Jurusan Civic Hukum (PPKN), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

²Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹trisaktihandayaniwidodo@gmail.com, ²wahyuwidodohandayani@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the framework of gender mainstreaming in education, necessary to prepare various policy instruments more operational. In the education sector, need to be applied to routine programs and development which can minimize the gender gap, either in the inputs, processes and outputs of education. This research used a qualitative approach supported by quantitative, while the design of the research was a qualitative descriptive design. The data required are the primary and secondary data. The conclusions were the problems of functional literacy education in East Java was gender inequality on functional literacy student and managing adverse men. But actually, a reflection of the number of women are illiterate and should follow the functional literacy education. The number of women follow the functional literacy were caused motivation factor, environmental, economic and cultural. The basic concept of functional literacy education starts from policy analysis, policy reformulation, action plans, implementation, monitoring and evaluation of functional literacy education which gender responsive. Suggestions were the ratio of men and women in functional literacy education were balanced by: (a) increasing male participation in education; (b) the equal opportunities between in functional literacy education proportionally; (c) realizing a more equitable educational opportunities in the functional literacy program with regard to fairness and gender equality; (d) realizing functional literacy education alternative for areas have a religious base; (e) minimize gender inequality in the functional literacy program and achieving gender equality in the field of expertise/skills and professionalism; (f) create program and functional literacy learning system which "gender friendly".

Keywords: Gender, education, functional literacy

ABSTRAK

Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Dalam rangka pengarusutamaan gender bidang pendidikan, perlu disusun berbagai instrumen kebijakan yang lebih operasional. Di sektor pendidikan, perlu diterapkan program-program rutin dan pembangunan yang dapat memperkecil kesenjangan gender, baik dalam input, proses dan output pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didukung kuantitatif, sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapatkan adalah permasalahan pendidikan KF di Jawa Timur adalah adanya ketidaksetaraan gender pada warga belajar dan pengelola KF yang merugikan laki-laki. Namun dibalik itu sebenarnya adalah cerminan banyaknya perempuan yang buta aksara sehingga harus mengikuti pendidikan KF. Banyaknya perempuan yang mengikuti KF disebabkan factor motivasi, lingkungan, ekonomi dan budaya. Konsep dasar perombakan pendidikan KF dimulai dari analisis kebijakan, reformulasi kebijakan, rencana aksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional yang responsive gender. Saran yang perlu dilakukan adalah mewujudkan rasio laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan KF menjadi seimbang melalui: (a) peningkatan partisipasi dalam bidang pendidikan; (b) pemberian kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan KF secara proporsional; (c) mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada program keaksaraan fungsional dengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, (d) mewujudkan pendidikan keaksaraan fungsional alternatif bagi daerah yang memiliki basis keagamaan, (e) memperkecil ketimpangan gender pada program keaksaraan fungsional dan mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian/ketrampilan dan profesionalisme yang berwawasan gender; (f) mewujudkan program dan sistem pembelajaran keaksaraan fungsional yang “ramah gender”.

Kata Kunci : *Gender, pendidikan, Keaksaraan fungsional*

PENDAHULUAN

Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan masih adanya kesenjangan gender pada bidang pendidikan keaksaraan fungsional. Poin penting dari penelitian tersebut adalah banyaknya perempuan yang mengikuti kegiatan Keaksaraan Fungsional. Hal ini menunjukkan akses pada pendidikan formal bagi perempuan masih rendah.

Pendidikan mengharuskan adanya persamaan kesempatan antar jenis kelamin. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan masih dapat ditolerir jika perbedaan tersebut masih sebatas karena perbedaan jenis kelamin. Namun, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir, yaitu perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (*gender discrimination effect*), yaitu perbedaan kesempatan atau perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pendidikan, dan perbedaan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku.

Kesenjangan gender pada pendidikan keaksaraan fungsional di Jawa Timur tampak dari beberapa aspek pendidikan yang mempunyai indeks paritas (IP) yaitu pembagian antara capaian kinerja perempuan dibandingkan capaian kinerja laki-laki yang cenderung merugikan perempuan, diantaranya adalah pada tingkat buta aksara (2,00), dan tutor KF (0,70). Tampak dari

semua indikator menunjukkan perempuan masih lebih rendah keterlibatannya dalam pendidikan dibanding laki-laki sehingga terjadi kesenjangan gender.

Berangkat dari kondisi kesenjangan gender yang merugikan perempuan tersebut, terutama guna menunjang wajib belajar sembilan tahun, perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan gender bidang pendidikan dasar di Propinsi Jawa Timur. Analisis tersebut menekankan pada dua isu gender dalam bidang pendidikan, yaitu: akses dan pemerataan pendidikan dan akuntabilitas dan tatakelola pendidikan. Isu akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus untuk mengetahui beberapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya untuk setiap kelompok usia sekolah dan setiap jenjang pendidikan. Isu akses dan pemerataan pendidikan mempunyai indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif yang meliputi: angka buta huruf dan warga belajar KF. Aspek akuntabilitas dan tatakelola pendidikan terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender dalam mengelola pendidikan. Indikator yang umum digunakan antara lain: tutor KF dan Pengelola KF.

Kedua isu gender bidang pendidikan tersebut menjadi bahan analisis kebijakan untuk mengetahui kondisi riil ada tidaknya kesenjangan gender di pendidikan keaksaraan fungsional di Propinsi Jawa Timur. Kebijakan berwawasan gender yang masih memungkinkan adanya kesenjangan gender perlu dioptimalkan sehingga nantinya akan didapatkan kesetaraan gender di jenjang pendidikan KF.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan meliputi: pengamatan berperan serta (observasi partisipasi), wawancara (*interview*), dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti bertujuan membuat pencandraan (paparan) secara sistematis, faktual dan akurat kritis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat subjek penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota. Subjek penelitian ini dilakukan dengan menelaah implementasi kebijakan pada beberapa Dinas Pendidikan di Propinsi Jawa Timur. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan secara selektif berdasarkan hasil observasi.

Sumber data utama (primer) dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata dan dokumen yang akurat. Sementara itu sumber data sekunder diperoleh dari keterangan lisan atau tertulis dari tingkat yang kedua. Data primer dalam bentuk kata-kata dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur atau pimpinan yang mengurus gender bidang pendidikan. Selain itu data primer juga diperoleh dari kepala dinas P dan K Propinsi Jawa Timur atau pimpinan yang ditunjuk untuk mengurus gender bidang pendidikan.

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah: (1) peneliti, sebagai instrumen utama penelitian; (2) pedoman wawancara (*interview guide*), berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan berkembang ke arah yang lebih spesifik; (3) catatan lapangan (*field notes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan; (4) alat perekam (perekam *recorder* dan *handycam*) sebagai alat bantu merekam hasil wawancara. Untuk menambah informasi

yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji, dilakukan juga wawancara mendalam terhadap beberapa informan seperti pengambil kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, *interview* (termasuk dengan *key informant*) dan dokumentasi. Data yang diperlukan meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif terutama digunakan untuk mengetahui optimalisasi Pengarusutamaan Gender di pendidikan KF sementara data kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di pendidikan KF. Data diolah melalui beberapa tahapan: (1) *open coding*; (2) *axial coding*; dan (3) *selective coding*.

Analisis data secara umum menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang didukung kuantitatif dengan menggunakan beberapa model pendekatan. *Root analysis* digunakan untuk membongkar permasalahan dalam penyusunan konsep dasar pengarusutamaan gender pada bidang pendidikan KF di Jawa Timur. Analisis ini akan mencari akar penyebab masalah yang paling dasar dari berbagai permasalahan yang muncul di permukaan.

Hasil analisis data sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian disajikan dalam bentuk formal maupun informal. Bentuk formal meliputi: (1) pendeskripsian tentang data-data hasil penelitian kebijakan baik berupa angka maupun kata-kata atau *phrase* verbal yang terdiri dari hasil wawancara, pengamatan, catatan dan dokumentasi kebijakan pendidikan berwawasan gender pada jenjang sekolah dasar dari dinas pendidikan kabupaten/kota terpilih; (2) bagan yaitu poin-poin kalimat yang disusun secara sistematis untuk memudahkan penggambaran tentang proses penelitian yang terdiri dari dokumen dan arsip kebijakan pendidikan berwawasan gender pada jenjang sekolah dasar; dan (3) foto-foto kegiatan implementasi kebijakan pendidikan

berwawasan gender pada jenjang sekolah dasar selama penelitian. Sedangkan bentuk informal berupa narasi yaitu uraian kalimat yang menjelaskan semua aktivitas penelitian kebijakan pendidikan berwawasan gender pada jenjang sekolah dasar dalam bentuk bab-bab. Penyajian data dibuat secara sistematis dan efisien sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan kejelasan yang optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam Penyusunan Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Propinsi Jawa Timur

Secara umum warga belajar Keaksaraan Fungsional di Jawa Timur terdapat ketidaksetaraan gender di pihak yang merugikan laki-laki dengan IP sebesar 3.51. Ketidaksetaraan gender pada angka warga belajar Keaksaraan Fungsional terjadi di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur. Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan perempuan terdapat di kabupaten Mojokerto dengan IP sebesar 0.02. Sedangkan ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan laki-laki terdapat di kota Madiun dengan IP sebesar tidak terbatas karena tidak ada warga belajar laki-laki.

Secara umum tutor Keaksaraan Fungsional di Jawa Timur terdapat ketidaksetaraan gender di pihak yang merugikan perempuan dengan IP sebesar 0.70. Ketidaksetaraan gender pada angka tutor Keaksaraan Fungsional terjadi di sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa Timur, hanya ada 1 kota dan kabupaten yang mengalami kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan perempuan terdapat di kabupaten Madiun dengan IP sebesar 0.01. Sedangkan ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan laki-laki terdapat di kota Madiun dengan IP sebesar 39.00. Sedangkan kesetaraan gender terjadi pada

kabupaten Bangkalan dengan IP sebesar 1.00.

Secara umum pengelola Keaksaraan Fungsional di Jawa Timur terdapat ketidaksetaraan gender di pihak yang merugikan laki-laki dengan IP sebesar 1.11. Ketidaksetaraan gender pada angka tutor Keaksaraan Fungsional terjadi di sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa Timur, hanya ada 2 kota dan kabupaten yang mengalami kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan perempuan terdapat di kabupaten Pacitan dan kabupaten Kediri dengan IP sebesar 0.39. Sedangkan ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan laki-laki terdapat di kabupaten Sidoarjo dengan IP sebesar 15.55. Sedangkan kesetaraan gender terjadi pada kabupaten Trenggalek dan kabupaten Bangkalan dengan IP sebesar 1.00.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan mengikuti keaksaraan fungsional adalah faktor motivasi, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor budaya. Faktor motivasi dijabarkan dalam perubahan perilaku/sikap dari warga belajar perempuan yang lebih termotivasi dalam pembelajaran sehingga lebih banyak perempuan di banding laki-laki. Perempuan mempunyai lebih banyak waktu karena peran sebagai ibu rumah tangga. Setelah urusan rumah tangganya selesai maka mereka dapat meluangkan waktu untuk mengikuti pendidikan KF. Sedangkan laki-laki kurang termotivasi untuk berbuat belajar karena disibukkan oleh pekerjaannya salah satunya adalah agak mengabaikan pendidikan KF.

Pengaruh lingkungan yang paling berpengaruh adalah pertemanan antar perempuan. Lingkungan pertemanan ini mempengaruhi keputusan perempuan untuk memutuskan masa depannya. Ketika ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lagi bagi perempuan maka banyak perempuan yang kemudian ikut menjadi warga belajar.

Menurut penelitian Balitbang Diknas, banyaknya warga belajar mempunyai keterkaitan erat dengan kemampuan ekonomi orang tua dan juga pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Masyarakat yang rendah tingkat penghasilannya harus mengeluarkan biaya yang proporsinya lebih besar dari masyarakat yang lebih tinggi penghasilannya. Sehingga orang tua sangat berperan dalam menentukan bersekolah atau tidaknya anak.

Faktor budaya yang paling berpengaruh adalah budaya patriarkhi dan nikah dini. Budaya patriarkhi menyebabkan orang tua memomorsatukan anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan pendidikan seadanya. Akibatnya perempuan banyak yang kemudian menderita buta aksara. Demikian juga dengan banyaknya pernikahan dini yang merugikan perempuan dari sisi pendidikan. Perempuan banyak yang putus sekolah karena menjadi ibu rumah tangga. Hal ini yang menyebabkan banyaknya perempuan yang mengikuti pendidikan KF.

Variabel akuntabilitas dan tata kelola pendidikan, pada indikator tutor keaksaraan fungsional terjadi ketidaksetaraan yang merugikan perempuan sedangkan indikator pengelola keaksaraan fungsional terjadi ketidaksetaraan yang merugikan laki-laki. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah faktor sosial-budaya dan faktor ekonomi dan faktor internal keluarga. Faktor sosial budaya dirupakan dalam bentuk persepsi masyarakat sampai sekarang yang menganggap keaksaraan fungsional adalah pekerjaan perempuan. Karena menganggap sosok perempuan yang lebih telaten dan sabar mendidik anak ketimbang laki-laki. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fakih (1999) bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kasar, kuat,

perkasa, dan jantan. Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status, posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri biologisnya. Laki-laki dianggap mempunyai sifat kuat dan tegas, menjadi pelindung bertugas mencari nafkah dan menjadi pemilik dunia kerja (publik), dan sebagai orang pertama. Sedangkan perempuan dianggap bersifat lemah sekaligus lembut, perlu dilindungi, mendapat pembagian tugas sebagai pengasuh anak dan tugas domestik lainnya serta dianggap sebagai orang nomor dua (Fakih, 1996). Pendidikan anak dianggap bagian dari tugas perempuan diranah domestik, dan kemudian karena pendidikan sekarang merupakan ranah publik, maka perempuan dianggap pantas untuk mengemban tugas tersebut.

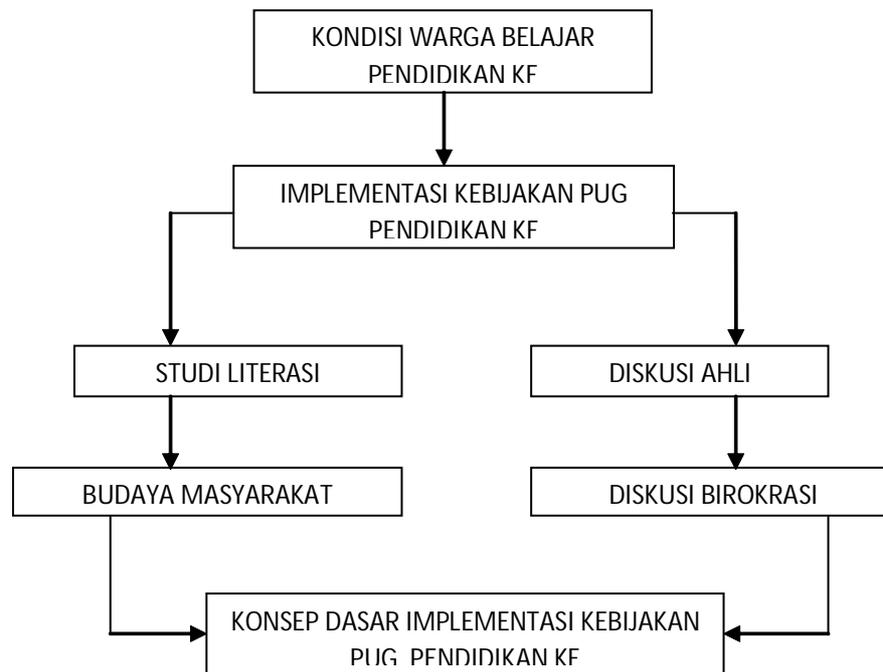
Laki-laki mencari pekerjaan yang secara finansial layak secara ekonomi. Jika secara finansial kurang menarik, maka laki-laki cenderung tidak memilih pekerjaan tersebut. Keaksaraan fungsional dianggap pekerjaan sosial, karena penghasilan yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Sehingga lebih banyak perempuan yang mengelola keaksaraan fungsional dibandingkan laki-laki. Keaksaraan fungsional adalah ranah publik yang bisa dimasuki perempuan yang mau menerima penghasilan yang kurang menguntungkan secara ekonomi.

Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Propinsi Jawa Timur

Implementasi pendidikan KF selama ini ternyata belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan kondisi masih banyaknya penduduk yang buta aksara terutama kaum perempuan yang mencapai 75-80 persen.

Oleh sebab itu perlu disusun konsep dasar implementasi Pengarusutamaan gender pada Pendidikan KF yang dapat mengoptimalkan

pemberantasan buta aksara. Kosep itu dapat disusun dengan skema pada Gambar1. berikut ini



Gambar 1. Skema Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Propinsi Jawa Timur

Eksistensi kelompok etnik di Jawa Timur memiliki berbagai macam nilai kultural yang harus dipertimbangkan dalam rangka pembangunan yang berparadigma otonomi daerah. Sementara itu, laporan Susenas (2000) menunjukkan bagaimana sub kultur daerah berpengaruh kuat pada situasi status pendidikan perempuan di masing-masing kabupaten/kota. Secara keseluruhan status perempuan di daerah-daerah sub kultur Madura (Madura dan tapal kuda) lebih buruk dibanding rata-rata Jawa Timur. Daerah-daerah di sub kultur tersebut menjadi target prioritas pemerintah maupun aktivis perempuan dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan

Melihat kelebihan dan kekurangan, segi positif maupun negatif dari masing-masing komunitas wilayah budaya di Jawa Timur tersebut dapat dipakai sebagai dasar penyusunan konsep dasar untuk merombak pendidikan keaksaraan fungsional. Pada gilirannya pengambilan kebijakan

pembangunan terutama bidang pendidikan dapat memakai pendekatan “kearifan budaya lokal” yang ada sehingga tujuan pendidikan KF dapat tercapai dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Langkah-langkah pelaksanaan untuk penyusunan konsep dasar implementasi PUG pada pendidikan KF adalah:

- Analisis kebijakan pendidikan KF yang responsif gender
- Reformulasi kebijakan pendidikan KF yang responsif gender
- Rencana aksi/kebijakan operasional pendidikan KF yang responsif gender
- Pelaksanaan program pendidikan KF
- Monitoring dan evaluasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Permasalahan pendidikan KF di Jawa Timur adaah adanya ketidaksetaraan gender pada warga belajar dan

pengelola KF yang merugikan laki-laki. Namun dibalik itu sebenarnya adalah cerminan banyaknya perempuan yang buta aksara sehingga harus mengikuti pendidikan KF. Banyaknya perempuan yang mengikuti KF disebabkan factor motivasi, lingkungan, ekonomi dan budaya.

- Konsep dasar perombakan pendidikan KF dimulai dari analisis kebijakan, reformulasi kebijakan, rencana aksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional yang responsive gender

Saran

- Mewujudkan rasio laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan KF menjadi seimbang melalui: (a) peningkatan partisipasi laki-laki dalam bidang pendidikan; (b) pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan KF secara proporsional.
- Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada program keaksaraan fungsional dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- Mewujudkan pendidikan keaksaraan fungsional alternatif bagi daerah yang memiliki basis keagamaan.
- Memperkecil ketimpangan gender pada program keaksaraan fungsional dan mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian/ketrampilan dan profesionalisme yang berwawasan gender.
- Mewujudkan program dan sistem pembelajaran keaksaraan fungsional yang “ramah gender”.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1995. **Metodologi Penelitian Berperspektif Wanita dalam Riset**

Sosial. Program Studi Kajian wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

BPS Jawa Timur, 2005. **Jawa Timur dalam Angka**. Surabaya

Depdiknas, 2004. **Profil Gender Bidang Pendidikan**. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Jakarta.

Depdiknas, 2004. **Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan**. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Jakarta

Dinas P & K Propinsi Jawa Timur, 2006. **Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan**. Surabaya

Handayani, T., Sugiarti, 2002. **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.

Pokja PUS, 2003. **Education For All (Pendidikan Untuk Semua)**. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Pokja PUS, 2003. **Gender**. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Widodo, W., M.A. Kresno, F. Wiryani, A. Zainudin, H. Cahyono, W. Pancapalaga dan D.E. Widyastuti, 2004. **Analisis Situasi Pendidikan Untuk Semua Propinsi Jawa Timur**. Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang

Widodo, W., 2006. **Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender di Jawa Timur**. Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang

Widodo, W., 2007. **Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender dalam Upaya Meminimalkan Kesenjangan Gender pada Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Timur**. Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang

Widodo, W., Kepi S., Asri H., Arif B.W., Siti Ch. H., Sugiarti, dan Siti A., 2008.

**Position Paper Pengarusutamaan
Gender (PUG) bidang Pendidikan
Propinsi Jawa Timur tahun 2008.**
Pokja Gender bidang Pendidikan
Propinsi Jawa timur. Surabaya.